

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mengacu pada hasil penelitian bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2022.
2. Mengacu pada hasil penelitian bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2022. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.
3. Mengacu pada hasil penelitian bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2022. Hal tersebut dikarenakan apabila upah minimum kabupaten mengalami peningkatan tentunya dapat menyebabkan seseorang lebih termotivasi dalam mencari pekerjaan yang pada gilirannya akan meningkatkan Tingkat partisipasi angkatan kerja.
4. Mengacu pada hasil penelitian bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat

Partispasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2022. Hal tersebut dikarenakan meskipun pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja, namun tidak semua individu memiliki sebuah keterampilan yang sesuai untuk memanfaatkan kesempatan tersebut

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, peneliti dapat memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Bagi peneliti selanjutnya dengan bidang yang sama, diharapkan menambah variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Partispasi Angkatan Kerja, seperti Kemiskinan, Pendidikan, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Manusia,. Kemudian untuk ruang lingkup wilayah dan periode tahun penelitiannya diharapkan untuk diperluas atau berbeda serta dapat melakukan penelitian perbandingan, karena dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan.
2. Penetapan upah minimum perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keadaan tenaga kerja dengan memperhatikan keadaan ekonomi pada daerah tersebut agar upah dapat menyesuaikan pada keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

3. Pemerintah perlu lebih meningkatkan penyediaan lapangan kerja agar penduduk usia kerja dapat memasuki dunia kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pelatihan dan berbagai dukungan dalam berwirausaha agar dapat meningkatkan jumlah masyarakat berwirausaha sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan.